

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketegangan militer antara Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan mengalami eskalasi, meningkatkan risiko konflik bersenjata di wilayah tersebut. Menurut pakar dari Center of Strategic and International Studies (CSIS), potensi konflik di area ini bahkan melebihi konflik di sekitar Taiwan.¹ Dinamika hubungan Vietnam-Tiongkok dalam sengketa ini juga perlu diperhatikan karena dampaknya dapat meluas ke seluruh kawasan. Insiden-insiden seperti penghadangan dengan meriam air, penggunaan laser militer, dan tabrakan kapal yang disengaja menunjukkan konfrontasi langsung yang semakin intensif.²

Tiongkok terus memperluas kehadirannya di wilayah sengketa melalui pembangunan pulau buatan dan pengerahan aset militer. Hingga kini, Tiongkok memiliki 20 pos di Kepulauan Paracel dan tujuh pos di Kepulauan Spratly, dengan infrastruktur militer seperti landasan pacu dan fasilitas radar yang memperkeruh ketegangan.³ Di sisi lain, negara-negara ASEAN yang mengklaim wilayah tersebut, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia, meningkatkan patroli dan mempertahankan kehadiran mereka di wilayah yang diperebutkan. Filipina,

¹ Keith Johnson, "China's South Sea Aggression Against the Philippines Provokes Pushback," Foreign Policy, 2024, <https://foreignpolicy.com/2024/06/06/south-china-sea-philippines-fishing-vessels-maritime-conflict-shoal/>.

² Sam Beltran, "Is It Time for the Philippines and China to Resume Talks over Their Maritime Row?," South China Morning Post, November 8, 2024, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3285826/it-time-philippines-and-china-resume-talks-over-their-maritime-row>.

³ AMTI-CSIS, "Island Tracker: China," Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies, 2022, <https://amti.csis.org/island-tracker/china/>.

misalnya, menempatkan pasukan di BRP Sierra Madre di Second Thomas Shoal sebagai simbol perlawanan terhadap klaim Tiongkok.⁴

Sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi isu krusial bagi ASEAN karena berkaitan erat dengan latar belakang pembentukannya. Deklarasi ASEAN yang ditandatangani di Bangkok pada 1967 berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan.⁵ Jika sengketa berkembang menjadi konflik bersenjata besar, perdamaian dan stabilitas regional akan terganggu. Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC) tahun 1976 yang telah diratifikasi oleh sepuluh negara ASEAN dan Tiongkok menekankan penyelesaian konflik secara damai, menunjukkan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas sengketa ini.⁶

ASEAN telah berevolusi dari asosiasi regional menjadi rezim keamanan kompleks.⁷ Piagam ASEAN yang diberlakukan pada 2008 menjadi landasan hukum yang memperkuat struktur institusional ASEAN, termasuk pilar ASEAN Political-Security Community (APSC).⁸ Blueprint APSC 2025 yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur menegaskan komitmen ASEAN menjadi "komunitas yang terintegrasi secara politik, kohesif, damai, stabil dan tangguh

⁴ Al Jazeera staff, "What's behind Escalating China-Philippines Tensions in the South China Sea?," Al Jazeera, October 11, 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/11/whats-behind-escalating-china-philippines-tensions-in-the-south-china-sea>.

⁵ Yang Sung Ik, "Why Is It Important for ASEAN to Peacefully Resolve the South China Sea," 2024.

⁶ Yoga Suharman, "Dilema Keamanan Dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan," *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (2019): 127, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>.

⁷ Daljit Singh, "The ASEAN-Centred Cooperative Security Regime in Asia," *Palgrave Macmillan US EBooks*, January 1, 2016, 225–39, https://doi.org/10.1057/978-1-352-00023-8_13.

⁸ A. Acharya, *ASEAN and Regional Order: Revisiting Security Community in Southeast Asia* (Routledge, 2021), 45–63.

dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan komprehensif."⁹ Blueprint ini secara eksplisit memprioritaskan penyelesaian konflik secara damai dan pengelolaan sengketa teritorial.

Legitimasi ASEAN sebagai rezim keamanan diperkuat melalui pengembangan institusional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) yang dibentuk tahun 1994, ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) tahun 2006, dan ADMM-Plus yang melibatkan mitra dialog sejak 2010. Mekanisme-mekanisme ini menyediakan platform formal bagi dialog keamanan, diplomasi preventif, dan confidence-building measures yang merupakan fungsi esensial dari rezim keamanan.¹⁰ Dari perspektif teoretis, ASEAN memenuhi kriteria sebagai rezim keamanan berdasarkan definisi Krasner. ASEAN telah mengembangkan seperangkat norma yang dikenal sebagai "ASEAN Way," yang menekankan konsensus, non-intervensi, dan penyelesaian konflik secara damai sebagai landasan pendekatan terhadap keamanan regional. Norma-norma ini telah dilembagakan melalui berbagai instrumen hukum dan mekanisme kelembagaan ASEAN.

ASEAN juga mengembangkan kerangka kerja khusus untuk menangani sengketa Laut Tiongkok Selatan. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani tahun 2002 antara ASEAN dan Tiongkok menjadi landasan bagi upaya diplomatik mengelola ketegangan di wilayah tersebut.¹¹ Meskipun DOC bukan instrumen yang mengikat secara hukum,

⁹ ASEAN Secretariat, "ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025" (2020).

¹⁰ Kei Koga, *Managing Great Power Politics: ASEAN, Institutional Strategy, and the South China Sea* (Bristol University Press, 2022), 128–156.

¹¹ Hoang Thi Ha, *From Declaration to Code: Continuity and Change in China's Engagement with ASEAN on the South China Sea*, Yusof Ishak Institute (Singapore: ISEAS Publisher, 2019), <https://doi.org/10.1355/9789814376440-014>.

dokumen ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola sengketa dan mencegah eskalasi konflik. Negosiasi berkelanjutan untuk Code of Conduct (COC) yang lebih mengikat menunjukkan upaya ASEAN memperkuat perannya sebagai rezim keamanan. Meskipun proses negosiasi telah berlangsung lebih dari dua dekade dan menghadapi banyak tantangan, komitmen menyelesaikan COC menunjukkan pengakuan terhadap peran ASEAN sebagai fasilitator utama dalam penyelesaian sengketa regional. Single Draft Negotiating Text yang disepakati tahun 2018 dan terus direvisi menunjukkan kemajuan dalam upaya ASEAN membangun struktur normatif yang lebih kuat.

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) yang dibentuk pada tahun 2013 menunjukkan komitmen institusional ASEAN untuk memperkuat kapasitasnya dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Selain itu, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi pada tahun 2019 menekankan prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, dan kerja sama dalam mengatasi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut Tiongkok Selatan.¹² AOIP memposisikan ASEAN sebagai pemain sentral dalam arsitektur keamanan regional yang lebih luas, memperkuat legitimasinya sebagai rezim keamanan.

Berdasarkan konsep perdamaian stabil oleh Kacowicz, proses menuju perdamaian regional berkembang melalui tiga tahapan: perdamaian negatif, perdamaian stabil, dan komunitas keamanan multilateral.¹³ Saat ini Laut Tiongkok Selatan berada di tahap perdamaian negatif, yang berarti hanya ada ketidakhadiran

¹² ASEAN Secretariat, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific" (2021).

¹³ Yaacov Bar-Siman-Tov Arie M. Kacowicz and Magnus Jerneck Ole Elgstrom, eds., *Stable Peace among Nations* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000).

konflik bersenjata, namun ketegangan tetap ada. Untuk mencapai perdamaian stabil, diperlukan empat prasyarat: rezim yang stabil, kepuasan terhadap perjanjian damai, tindakan negara yang dapat diprediksi, dan saluran komunikasi yang efektif.

Pada pertemuan di sekretariat ASEAN 2023 lalu, para Menteri Luar Negeri mengeluarkan pernyataan tegas terkait perdamaian yang diinginkan di Kawasan Laut Tiongkok Selatan. Mereka menegaskan bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian dari wilayah maritim Asia Tenggara dan harus tetap menjadi kawasan bebas, yang dilindungi oleh prinsip stabilitas, perdamaian, dan kebebasan navigasi. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan tersebut, serta menyatakan keprihatinan atas perkembangan yang dapat melemahkan keamanan regional. Pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016. Meskipun begitu, beberapa diplomat ASEAN tidak sepakat dengan pernyataan tersebut dan menilai terlalu keras untuk standar ASEAN.¹⁴

Ketegangan yang semakin memuncak di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan tantangan besar bagi ASEAN dalam memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Meskipun ASEAN telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui berbagai mekanisme yang ada, seperti DOC, TAC, dan upaya untuk merumuskan COC, kesulitan dalam mencapai penyelesaian yang efektif tetap menjadi isu utama.

¹⁴ Kris Mada, "ASEAN Tegaskan Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan," *Kompas.Id*, terakhir dimodifikasi pada tahun 2023, diakses pada 30 Januari, 2025, <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/31/en-asean-tegaskan-kepemilikan-laut-china-selatan>.

1.2 Rumusan Masalah

Sengketa Laut Tiongkok Selatan terus memanas dengan meningkatnya ketegangan militer antara Filipina dan Tiongkok, serta kompleksitas hubungan Vietnam-Tiongkok yang semakin dalam. Insiden konfrontasi langsung dan pembangunan infrastruktur militer di wilayah sengketa memperburuk situasi, sementara ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mengupayakan solusi damai meskipun telah memiliki berbagai instrumen seperti Deklarasi ASEAN, TAC, dan Piagam ASEAN. Penelitian ini berfokus pada rezim internasional dalam bentuk institusi, di mana ASEAN dipandang sebagai sebuah rezim keamanan yang berperan dalam mengelola sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mengapa Rezim Keamanan ASEAN belum mampu mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa ini meskipun komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas telah ditegaskan melalui berbagai mekanisme yang ada.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka muncul pertanyaan penelitian berupa, mengapa Rezim Keamanan ASEAN belum berhasil mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji alasan di balik kegagalan Rezim Keamanan ASEAN dalam mencapai resolusi yang efektif terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, peneliti mengharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan akademik di bidang Hubungan Internasional, terutama yang berkaitan dengan studi mengenai ASEAN dan Rezim Internasional.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pemangku kepentingan terkait isu ini, sebagai representasi pandangan dari masyarakat kawasan ASEAN. Temuan dari studi ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam literatur Hubungan Internasional, khususnya pada topik ASEAN dan Rezim Internasional.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti isu yang diangkat dalam penelitian ini berupa mengapa ASEAN belum berhasil mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Peneliti pun menghimpun beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yang sekiranya dapat menunjang keabsahan penelitian ini.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan pandangan yang beragam mengenai efektivitas ASEAN dalam menangani sengketa Laut Tiongkok Selatan. Salah satunya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Le Hu, yang berjudul “Examining ASEAN’s Effectiveness in Managing South China Sea Disputes”. Artikel ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan kepentingan di antara

negara-negara ASEAN, mereka masih dapat bertindak kolektif dalam mengelola sengketa LTS, berkat pendekatan diplomatik yang menghindari konfrontasi langsung. Meskipun hasil yang dicapai oleh ASEAN dalam beberapa kasus telah menunjukkan efektivitas, tetap ada kompromi dalam menyelesaikan isu yang tidak dianggap terlalu mendesak, sehingga mengarah pada penilaian efektivitas yang lebih moderat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik ASEAN, meskipun lebih fleksibel, tidak selalu menghasilkan solusi yang cepat dan pasti.¹⁵ Peneliti menggunakan artikel ini sebagai salah satu acuan, karena menilai efektifitas upaya ASEAN secara keseluruhan dalam mengelola sengketa LTS. Sedangkan penelitian ini lebih mempertanyakan mengapa ASEAN belum berhasil mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, yang dibuktikan dengan ketegangan yang masih berlangsung hingga saat ini di Kepulauan Spratly.

Selanjutnya, penelitian Rimsha Aziz yang berjudul "ASEAN's Diplomatic and Strategic Engagement in The South China Sea Dispute: An Analysis" membahas mengenai tantangan internal yang dihadapi ASEAN dalam menjaga konsensus di antara negara-negara anggotanya yang memiliki kepentingan yang berbeda, terutama dalam kaitannya dengan klaim teritorial mereka dan hubungan mereka dengan Tiongkok. Aziz mengkritik prinsip "ASEAN Way" yang menekankan konsensus dan non-intervensi, yang meskipun bertujuan untuk menghormati kedaulatan negara-negara anggota, sering kali memperlambat respons terhadap konflik dan menghambat tindakan kolektif yang efektif. Aziz juga menyarankan perlunya pendekatan yang lebih kohesif dalam internal ASEAN agar

¹⁵ Le Hu, "Examining ASEAN's Effectiveness in Managing South China Sea Disputes," *Pacific Review* 36, no. 1 (2023): 119–47, <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1934519>.

dapat menangani sengketa yang semakin kompleks ini .¹⁶ Artikel jurnal ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk menilai dinamika internal ASEAN yang turut berkontribusi terhadap respon kolektif ASEAN dalam mengelola konflik LTS.

Studi pustaka berikutnya adalah artikel jurnal yang berjudul “Penggunaan ASEAN Way Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan?” yang ditulis oleh Darmawan dan Kuncoro juga mengingatkan bahwa meskipun ASEAN telah berhasil menjaga stabilitas internalnya dan meredam potensi konflik antar negara anggota, namun pendekatannya yang mengutamakan dialog dan konsultasi belum memberikan solusi yang konkret dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. ASEAN dan China belum mencapai kesepakatan mengenai Code of Conduct (COC) yang mengikat, yang menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan sengketa ini. Meskipun begitu, mereka menilai bahwa ASEAN masih berhasil menjaga stabilitas kawasan dan menunjukkan solidaritas dalam menghadapi dinamika regional yang lebih besar.¹⁷ Artikel ini juga menghimpun upaya-upaya ASEAN untuk mengelola masalah keamanan terutama sengketa LTS, diantaranya melalui deklarasi keamanan, KTT ASEAN dan pertemuan Menteri luar negeri, melalui ASEAN Regional Forum dan pertemuan informal lainnya. Artikel ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melihat bentuk- bentuk upaya ASEAN dalam mengelola konflik LTS.

¹⁶ Rimsha Aziz et al., “ASEAN’s Diplomatic and Strategic Engagement in The South China Sea Dispute: An Analysis,” *Journal of Social & Organizational Matters* 3, no. 2 (2024): 204–24, <https://doi.org/10.56976/jsom.v3>.

¹⁷ Arief Bakhtiar Darmawan and Hestutomo Restu Kuncoro, “Penggunaan ASEAN Way Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan?,” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 8, no. 1 (June 29, 2019): 43, <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>.

Studi pustaka selanjutnya adalah penelitian oleh Siti Noralia Mustaza dan Irwan Syazli Saidin berjudul "ASEAN, China and the South China Sea Territorial Disputes: Analysis of Conflict Management Strategies" menganalisis efektivitas mekanisme yang ada dalam ASEAN untuk menangani konflik Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini membahas posisi ASEAN dalam sengketa tersebut, pendekatan China dalam memperkuat klaim teritorialnya, serta respons negara-negara pengklaim lain.¹⁸ Penelitian ini memanfaatkan sumber primer dan sekunder, seperti dokumen resmi ASEAN, prosiding pertemuan, dan pernyataan dari KTT ASEAN. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun ASEAN telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, pendekatan kolektifnya masih terbatas pada pengelolaan konflik, bukan penyelesaian sengketa.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian ini dengan menunjukkan bagaimana mekanisme internal ASEAN, seperti Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan upaya negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/COC), menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas kawasan meskipun terbatas dalam menghasilkan solusi yang mengikat secara hukum. Hal ini memberikan dasar bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh dinamika internal ASEAN, termasuk perbedaan kepentingan antaranggota yang memengaruhi efektivitas organisasi dalam merespons konflik.

Namun, artikel ini lebih menitikberatkan pada interaksi ASEAN dengan Tiongkok, tanpa memberikan analisis tentang kendala internal ASEAN yang

¹⁸ Mohd Irwan Syazli Saidin Siti Noralia Mustaza, "ASEAN, China and the South China Sea Territorial Disputes: Analysis of Conflict Management Strategies," *Intellectual Discourse* 28, no. 2 (2020): 577–98, <https://doi.org/10.33383/2020-2>.

berasal dari norma, mekanisme pengambilan keputusan, dan tantangan dalam mencapai konsensus. Celah ini dapat diisi oleh penelitian ini dengan fokus pada dinamika internal ASEAN sebagai unit eksplanasi, untuk memahami mengapa organisasi ini gagal mengurangi eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan, khususnya antara Tiongkok dan Filipina.

Studi pustaka selanjutnya yang dijadikan sebagai bahan rujukan adalah penelitian oleh Nehginpao Kipgen berjudul "ASEAN and China in the South China Sea Disputes"¹⁹ membahas keterlibatan ASEAN dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan sejak tahun 1992, ketika organisasi ini mulai mendorong pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Kipgen menjelaskan upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan melalui inisiatif seperti Deklarasi Tata Berperilaku (DOC) dan negosiasi Kode Etik (COC). Namun, artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan internal anggota ASEAN dan tekanan dari Tiongkok telah menghambat upaya konsensus dalam menangani konflik. Kipgen juga mencatat bagaimana prinsip *non-interference* dan konsensus sering kali memperlambat respons ASEAN terhadap dinamika konflik di Laut Tiongkok Selatan, yang semakin diperumit oleh klaim dan tindakan Tiongkok yang agresif.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian ini sebagai rujukan mengenai mekanisme internal ASEAN, seperti DOC dan COC, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya analisis terhadap perbedaan kepentingan di antara anggota ASEAN dan bagaimana hal tersebut

¹⁹ Nehginpao Kipgen, "Asean and China in the South China Sea Disputes," *Asian Affairs* 49, no. 3 (2018): 433–48, <https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1487691>.

memengaruhi kesatuan organisasi dalam merespons konflik. Namun, Kipgen lebih banyak membahas hubungan ASEAN dengan Tiongkok secara eksternal daripada analisis mengenai norma, prinsip, dan mekanisme internal ASEAN sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi dalam menyelesaikan konflik. Celah ini dapat diisi oleh penelitian ini dengan fokus pada bagaimana norma *non-interference*, konsensus, dan perbedaan kepentingan antarnegara anggota ASEAN memengaruhi ketidakmampuan organisasi ini dalam mengurangi eskalasi konflik antara Tiongkok dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis mengapa ASEAN belum berhasil mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, meskipun telah ada komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas melalui berbagai mekanisme yang ada, seperti DOC, TAC, dan terakhir COC. Peneliti menggunakan kerangka teori efektivitas rezim internasional oleh Underdal sebagai alat analisis yang relevan.

1.7.1 Konsep Rezim Internasional

Berdasarkan pandangan Krasner, rezim internasional merupakan seperangkat nilai dasar, pedoman perilaku, ketentuan, serta mekanisme pengambilan keputusan, baik yang dinyatakan secara langsung maupun tersirat, yang mengarahkan pola hubungan antara para pelaku dalam tatanan internasional pada bidang tertentu. Prinsip merupakan pandangan yang mencerminkan kepercayaan terhadap realitas, keterkaitan antara tindakan dan akibatnya, serta nilai integritas. Sementara itu, norma berperan sebagai aturan perilaku yang dibentuk

berdasarkan tanggung jawab dan hak yang dimiliki.²⁰ Sementara itu, aturan mengacu pada rekomendasi atau larangan yang spesifik terhadap tindakan tertentu. Mekanisme pengambilan keputusan merujuk pada langkah-langkah yang diterapkan dalam merumuskan dan mengimplementasikan keputusan kolektif.²¹

Di sisi lain, Keohane menggambarkan rezim internasional sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara. Keohane menyatakan bahwa rezim internasional merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh aktor negara untuk meraih tujuan bersama yang didasarkan pada kepentingan bersama dan timbal balik terkait isu internasional, meskipun tidak selalu menghasilkan sebuah rezim formal.²²

1.7.2 Teori Efektifitas Rezim Internasional

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan permasalahan regional yang dapat mengancam stabilitas keamanan Kawasan, yang membutuhkan upaya kolektif melalui ASEAN. Untuk itu ASEAN telah melakukan berbagai upaya melalui mekanisme yang ada, seperti DOC, TAC, dan terakhir upaya perumusan COC. Namun hingga saat ini ketegangan masih terus berlangsung di Laut Tiongkok Selatan. Sehingga penting untuk memahami kondisi keberhasilan atau penyebab kegagalan dari upaya ASEAN tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian underdal yang didasari pada pertanyaan “mengapa beberapa upaya untuk mengembangkan

²⁰ Stephen D Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences : Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables,” *Journal Of International Organization* 36, no. 2 (1982): 185–205, <https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>.

²¹ Krasner, 188–90.

²² Robert Owen Keohane, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory* (Boulder, CO: Westview Press, 1989).

dan menerapkan solusi bersama untuk masalah internasional berhasil sementara yang lainnya gagal” .

Menurut Underdal, suatu organisasi (rezim) dapat dikatakan efektif apabila berhasil menjalankan fungsinya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang terbentuknya organisasi tersebut.²³ Dalam kerangka efektivitas rezim, Underdal mengklasifikasikan efektivitas itu sebagai variabel dependen, sementara dua elemen utama yang memengaruhinya, yakni karakteristik isu yang dihadapi dan kapasitas rezim dalam meresponsnya, diposisikan sebagai variabel independen. Di samping itu, terdapat pula variabel *intervening*, yang merupakan konsekuensi dari variabel independen namun sekaligus memiliki pengaruh terhadap tingkat efektivitas rezim sebagai variabel dependen. Dalam hal ini, variabel *intervening* merujuk pada tingkat kolaborasi antar anggota rezim.²⁴

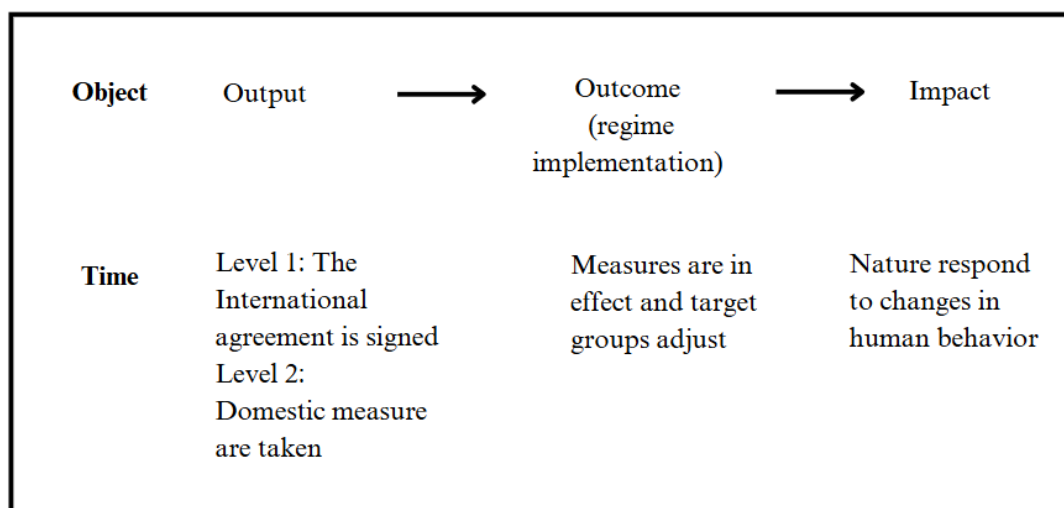
a. Variabel Dependen

Variabel pertama yang digunakan dalam analisis ini adalah variabel dependen, yaitu efektivitas rezim yang dinilai berdasarkan komponen *output*, *outcome*, dan *impact*. *Output* mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama, yang mencakup bentuk-bentuk pengaturan seperti program, struktur organisasi, dan regulasi yang dirancang untuk menjalankan ketentuan dalam rezim tersebut. Kebijakan ini bisa dituangkan secara tertulis maupun tidak, seperti dalam bentuk norma, prinsip, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi,

²³ Arild Underdal, “Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence” (The MIT Press, 2002), 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.7551/mitpress/2784.001.0001>.

²⁴ Underdal, 4–15.

atau aturan hukum. Secara umum, *output* ini diklasifikasikan ke dalam dua level, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 tercapai ketika tujuan rezim diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang secara resmi ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, sementara level 2 tercapai jika negara-negara terkait mengambil langkah-langkah domestik, seperti menyusun kebijakan domestik yang sesuai dengan nilai dan tujuan rezim tersebut.²⁵ Semakin tinggi tingkat *output*, semakin besar pengaruh positif terhadap efektivitas rezim. Untuk pemahaman lebih lanjut terkait objek penilaian efektivitas rezim, dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. 1 Skema Objek Penilaian Efektivitas Rezim

Sumber: Underdal (2002)

Outcome merujuk pada perubahan perilaku yang terjadi pada subjek akibat dari ketentuan yang ada dalam rezim. Jika selama berlakunya rezim terdapat perubahan perilaku yang sejalan dengan tujuan pembentukan rezim, maka *outcome* dianggap positif, dan sebaliknya. *Impact* adalah hasil atau dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari tingkat keberhasilan efektivitas rezim. *Impact* dapat dilihat dari sejauh mana anggota rezim mengikuti dan menjalankan ketentuan yang

²⁵ Underdal, 5–6.

telah ditetapkan. *Impact* dianggap positif jika dampaknya menunjukkan bahwa rezim berhasil mencapai tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam variabel dependen, jika *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai positif (sesuai dengan tujuan pembentukan rezim), maka rezim tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai negatif (tidak sesuai dengan tujuan pembentukan rezim), maka rezim tersebut tidak efektif. *Output*, *outcome*, dan *impact* merupakan indikator untuk menilai efektivitas rezim, karena efektivitas rezim mencakup dua aspek, yaitu perubahan perilaku (*behavioral change*) dan pencapaian teknis (*technical optimum*), yaitu sejauh mana rezim berhasil menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.²⁶

b. Variabel Independen

Variabel kedua dalam analisis ini adalah variabel bebas (*independent variable*). Arild Underdal, dalam bukunya yang dikutip oleh Edward L. Miles, menjelaskan bahwa efektivitas rezim dapat dianalisis melalui dua tipe, yaitu *problem malignancy* (tipe permasalahan) dan *problem-solving capacity* (kapasitas penyelesaian masalah). Kedua tipe ini berperan dalam mempengaruhi tingkat kolaborasi (*variabel intervening*) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas suatu sistem atau rezim.²⁷ Terdapat dua kategori permasalahan, yakni *benign* dan *malign*. Permasalahan tipe *benign* cenderung lebih mudah diselesaikan dan memiliki efek positif karena adanya keselarasan dalam

²⁶ Underdal, 6.

²⁷ Underdal, 13–14.

penyelesaian masalah. Tipe *benign* dibagi menjadi tiga karakter, yaitu *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavages*. *Coordination* merujuk pada kondisi harmonis antara anggota rezim yang tercermin dalam kerja sama yang efektif berkat adanya tujuan atau kepentingan yang serupa. Sifat *symmetry* menunjukkan hubungan saling terkait antar aktor, yang menyebabkan nilai-nilai dan kepentingan mereka cenderung sejalan, membuat masalah menjadi lebih mudah diatasi. Karakter *cross-cutting cleavages* menyederhanakan tipe masalah karena adanya keselarasan dalam koordinasi, nilai, dan tujuan antar aktor.

Sebaliknya, tipe *malign* merujuk pada permasalahan yang lebih kompleks dan sulit diatasi, yang memaksa rezim untuk bekerja lebih keras dan mematuhi peraturan yang ada. Untuk mengidentifikasi apakah rezim menghadapi permasalahan tipe *malign*, dapat dilihat melalui *incongruity* (ketidaksesuaian), yaitu perbedaan pandangan dalam rezim terkait isu utama yang menjadi fokus. *Incongruity* dapat diamati melalui *asymmetry*, yang mencerminkan perbedaan kepentingan nasional antar aktor dalam rezim, serta *cumulative cleavage*, yaitu perbedaan dalam rezim yang berpotensi menyebabkan perpecahan.²⁸

Tipe kedua dari variabel bebas adalah kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*), yang berfokus pada kemampuan rezim dalam menyelesaikan masalah. Underdal menyatakan bahwa terdapat tiga indikator utama untuk menilai kapasitas penyelesaian masalah, yaitu: (1) *institutional setting*, yang merujuk pada peraturan kelembagaan dalam rezim, dengan dua pengertian berbeda. Institusi sebagai arena berarti institusi berfungsi sebagai kerangka tempat politik

²⁸ Underdal, 15–22.

berlangsung, sedangkan organisasi sebagai aktor berarti hanya sebagian organisasi yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemain penting; (2) *distribution of power*, yaitu pembagian kekuasaan yang adil antara aktor-aktor yang terlibat, di mana ada pihak yang berperan sebagai pemimpin namun tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mengabaikan peraturan, dan pihak lain yang dapat mengendalikan pihak yang dominan; (3) *skill and energy*, yang merujuk pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam rezim tersebut. Semakin besar jumlah keterampilan dan energi yang tersedia, semakin besar kemungkinan rezim tersebut akan efektif dalam mencapai tujuannya.²⁹

c. Variabel *Intervening*

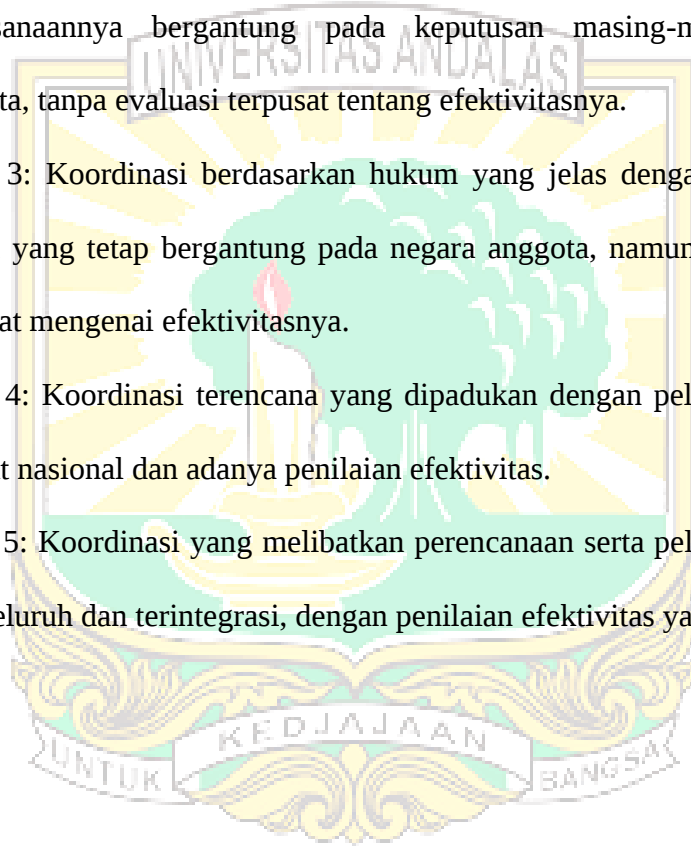
Variabel berikutnya adalah variabel *intervening*, yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*) dan, pada gilirannya, dapat mempengaruhi variabel terikat (*dependent variable*).³⁰ Variabel ini berhubungan dengan tingkat kolaborasi dalam suatu rezim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh seberapa kompleks masalah yang dihadapi (*problem malignancy*) dan seberapa efektif kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*). Untuk menilai tingkat kolaborasi dalam suatu rezim, perlu dilakukan analisis terhadap efektivitasnya. Analisis ini dimulai dengan melihat *output*, *outcome*, dan *impact*, yang membentuk suatu rangkaian sebab-akibat dalam sebuah peristiwa dan menjadi dasar untuk analisis

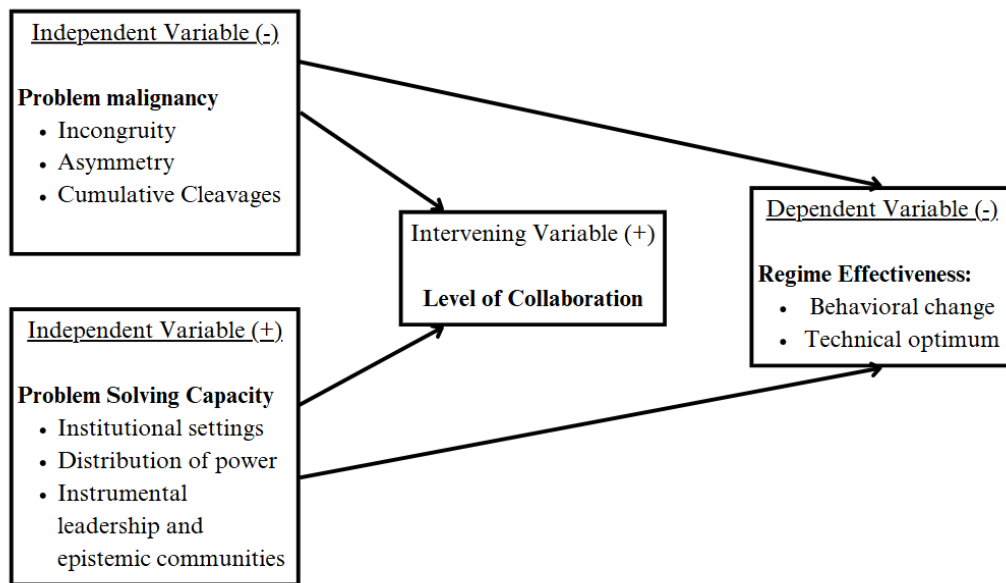
²⁹ Underdal, 23–29.

³⁰ Underdal, 6–15.

lebih lanjut. Dalam kajian ini, Underdal membagi tingkat kolaborasi menjadi enam tingkatan yang menggambarkan seberapa jauh kolaborasi itu terjalin, yaitu:

1. Level 0: Terdapat kesepakatan bersama namun tidak ada tindakan terkoordinasi.
2. Level 1: Tindakan koordinasi yang dilakukan secara tertutup.
3. Level 2: Koordinasi yang didasarkan pada aturan yang jelas, namun pelaksanaannya bergantung pada keputusan masing-masing negara anggota, tanpa evaluasi terpusat tentang efektivitasnya.
4. Level 3: Koordinasi berdasarkan hukum yang jelas dengan pelaksanaan aturan yang tetap bergantung pada negara anggota, namun ada penilaian terpusat mengenai efektivitasnya.
5. Level 4: Koordinasi terencana yang dipadukan dengan pelaksanaan pada tingkat nasional dan adanya penilaian efektivitas.
6. Level 5: Koordinasi yang melibatkan perencanaan serta pelaksanaan yang menyeluruh dan terintegrasi, dengan penilaian efektivitas yang terpusat.





Gambar 1. 2 Skema Model Inti Efektivitas Rezim

Sumber: Underdal (2002)

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga *variable dependent* (*output*, *outcome*, dan *impact*), *independent variable* (*problem malignancy* dan *problem-solving capacity*), dan *intervening variable* (tingkat kolaborasi) terkait erat dan saling mempengaruhi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2. Variabel terikat, yang melibatkan *output*, *outcome*, dan *impact*, dipandang sebagai tahapan yang saling berhubungan dalam rangkaian sebab-akibat yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu rezim berdasarkan hasil yang dihasilkan oleh rezim tersebut. Sementara itu, variabel bebas, yaitu *problem malignancy* dan *problem-solving capacity*, berperan dalam mempengaruhi tingkat kolaborasi yang tercipta, yang merupakan variabel *intervening*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang umum digunakan dalam studi Hubungan Internasional, dengan lebih dari 70% akademisi HI utamanya menggunakan pendekatan kualitatif.³¹ Metode ini mencakup studi kasus, penelusuran proses (*process-tracing*), dan analisis wacana, di antara lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menyajikan deskripsi mendalam dan kompleks tentang pengalaman manusia sebagai bahan kajian, yang sangat relevan untuk menganalisis isu-isu sosial dan politik yang tidak berwujud, seperti norma, nilai sosial, dan dinamika antaraktor di tingkat regional maupun internasional.

Metode ini juga dianggap sesuai dengan penelitian ini karena efektif untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan norma dan nilai sosial, status sosial ekonomi, peran gender, etnis, agama, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan dan kebijakan antarnegara, termasuk peran rezim keamanan ASEAN. Proses penelitian kualitatif, pada umumnya terdiri dari lima langkah: merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis, tinjauan literatur, memilih desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengungkap alasan di balik terjadinya suatu peristiwa, fenomena,

³¹ Andrew Moravcsik, "Trust, but Verify: The Transparency Revolution and Qualitative International Relations," *Security Studies* 23, no. 4 (2014): 663–88.

³² Emrah Utku GÖKÇE, "Qualitative Research Process Based On Explanation And Understanding In International Relations Studies, Methods And Computer Assisted Data Anaysis," *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.30794/pausbed.1116961>.

atau masalah.³³ ujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat yang melatarbelakangi suatu kejadian. Fokus penelitian ini adalah mencari tahu mengapa ASEAN belum mampu menghasilkan solusi yang efektif dalam menangani sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

1.8.2 Batasan Masalah

penelitian ini dibatasi dari tahun 2018 hingga 2024 dengan alasan kebaruan informasi dan relevansi dengan isu terkini. Periode ini dipilih karena menandai fase signifikan pasca Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) 2016, di mana implementasi dan respons terhadap putusan tersebut mulai terlihat jelas, termasuk peningkatan aktivitas militer, diplomasi, dan negosiasi ASEAN-China Code of Conduct (COC). Rentang waktu ini juga mencakup dinamika global dan regional yang memengaruhi stabilitas kawasan, seperti ketegangan AS-China, pandemi COVID-19, serta upaya negara-negara ASEAN dalam menjaga keseimbangan kekuatan. Dengan batasan ini, penelitian dapat memanfaatkan data dan informasi terbaru, sekaligus memberikan analisis yang komprehensif dan relevan terhadap efektivitas rezim keamanan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi yang ditulis oleh Prof. Mochtar Mas'ood, dalam melakukan penelitian penting untuk menetapkan unit analisis, unit ekspalanasi dan tingkat analisis untuk dapat

³³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, I (Jakarta: LP3ES, 1990).

menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan perspektif yang sesuai.³⁴

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis atau dikenal sebagai variable dependen, dalam penelitian ini efektivitas ASEAN sebagai rezim yang perilakunya (upaya dalam menyelesaikan sengketa di LTS) menjadi fokus utama untuk dianalisis.

Selanjutnya, unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang digunakan, atau dapat disebut sebagai variabel independen.³⁵

Adapun yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas rezim keamanan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa LTS. Dalam penelitian, penting juga untuk menentukan tingkat analisis yang menjadi penjelas di tingkatan mana yang diteliti. Menurut Kenneth Waltz, tingkat analisis dikategorikan menjadi 3 yaitu individu, negara, dan sistem internasional.³⁶ Tingkat analisis unit analisis dan unit eksplanasi berapa pada tingkat sistem internasional. Berdasarkan model hubungan unit analisis dan unit eksplanasi, dimana unit eksplanasi berada pada tingkat yang sama dengan unit analisis, maka penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional. Sehingga penelitian ini berada pada level sistem internasional, yang diambil dari unit eksplanasi.

1.8.4 Sumber data dan Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber terkait. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup teks,

³⁴ Mas'ood, 39–40.

³⁵ Mas'ood, 39.

³⁶ Kenneth Waltz, *Man, The State, and War* (New York: Colombia university press, 1959).

arsip, dan dokumen-dokumen resmi yang telah diverifikasi keabsahannya, seperti Deklarasi Tata Berperilaku di Laut Tiongkok Selatan (DOC), draf Kode Etik (COC), serta laporan dan pernyataan resmi ASEAN yang diambil dari situs web resmi ASEAN dan dokumen-dokumen terkait konflik di Laut Tiongkok Selatan. Data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai upaya-upaya ASEAN dalam menangani konflik serta dinamika internal yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Selain itu, data juga dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian akademis (skripsi, tesis, dan disertasi), serta makalah konferensi yang relevan dan telah teruji kredibilitasnya. Di samping itu, artikel berita dari situs media nasional dan internasional yang terpercaya juga digunakan untuk melengkapi informasi terkait eskalasi konflik antara Tiongkok dan Filipina, khususnya dalam hal respons regional yang diberikan oleh ASEAN.

1.8.5 Teknik analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data sekunder, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.³⁷ Pemilihan informasi dari data sekunder dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang relevan untuk membantu peneliti dalam mengeksplorasi isu yang menjadi fokus penelitian. Setelah itu, data tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan unit analisis dan unit

³⁷ et al Andrews, "Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflection," *The Grounded Theory Review* 11, no. 1 (2012): 5.

eksplanasi yang ada dalam penelitian, dan dilakukan interpretasi terhadap data yang telah dikelompokkan tersebut.

Data sekunder yang sudah dikategorikan selanjutnya dianalisis dengan menelusuri peristiwa atau interaksi yang terjadi dalam fenomena internasional. Langkah pertama adalah mengevaluasi perubahan yang muncul akibat fenomena tersebut. Kemudian, langkah kedua berfokus pada respon berupa strategi aksi atau interaksi yang muncul sebagai dampak dari perubahan tersebut. Setelah itu, data dikelompokkan untuk menunjukkan pola yang relevan dengan penelitian. Pola-pola ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka konseptual penelitian untuk menarik kesimpulan, yang memungkinkan peneliti menjelaskan secara rinci seluruh hasil, aspek, dan fakta yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Dengan menggunakan konsep analisis data yang diterapkan, peneliti menjelaskan proses pertama dengan membahas efektivitas Rezim Keamanan ASEAN melalui indikator efektivitas yang diukur menggunakan variable independen berupa tingkat kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah. Variabel ini dianalisis dengan menggunakan data yang diperoleh dari situs resmi ASEAN, komentar dari CSIS, artikel jurnal, dan portal berita internasional. Data ini memberikan wawasan mengenai kondisi geopolitik terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan yang menjadi sumber konflik serta informasi institusional ASEAN.

Proses kedua dalam analisis data bertujuan untuk menguraikan indikator *level of collaboration* yang merupakan variable *intervening*. Indikator *level of collaboration* dijelaskan dengan menganalisis variabel bebas. Variabel ini

dianalisis berdasarkan data yang mencakup dokumen, cetak biru Rezim Keamanan ASEAN, seperti DOC dan rancangan COC, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Terakhir adalah variabel dependen yang merupakan efektivitas rezim itu sendiri, data yang digunakan berasal dari dokumen resmi yang memuat aturan bersama yang disepakati dalam Rezim Keamanan ASEAN, seperti nilai, norma, kesepakatan, dan lainnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk menjaga agar pembahasan dalam tulisan ini tetap runtut dan mudah dicerna oleh pembaca, peneliti menyusun isi tulisan ke dalam sejumlah bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan pentingnya penelitian serta teknik penelitian yang diterapkan, yang kemudian disusun secara terstruktur ke dalam beberapa bagian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kondisi Geopolitik Laut Tiongkok Selatan yang Menjadi Titik Sengketa

Bab ini membahas kondisi geografis Laut Tiongkok Selatan, aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa, dan dinamika hubungan antar aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa serta norma dan aturan yang relevan dalam penyelesaian sengketa

di kawasan tersebut. Fokus utama adalah pada ASEAN dan mekanisme yang ada dalam organisasi tersebut.

BAB III: Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Bab ini akan membahas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, bab ini juga akan membahas nilai dan norma yang dianut ASEAN, seperti *ASEAN way*.

BAB IV: Analisis Efektivitas ASEAN dalam Menyelesaikan Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap alasan mengapa ASEAN belum berhasil mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, dengan menggunakan teori efektivitas rezim oleh Underdal.

BAB V : Penutup

Bagian ini menyajikan hasil kesimpulan serta saran yang relevan terhadap permasalahan yang telah dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini.